

PEMBERONTAKAN DI LHASA, TIBET

TAHUN 1959

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai salah satu persyaratan mencapai
gelar Sarjana Sastra Cina

Oleh

TRI ASTUTI HANDAYANI

04120010



JURUSAN SASTRA CINA

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2008

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul

PEMBERONTAKAN DI LHASA, TIBET

TAHUN 1959

Oleh

TRI ASTUTI HANDAYANI

Nim: 04120010

Disetujui untuk diujikan dalam Sidang Ujian

Skripsi Sarjana, oleh:

Mengetahui:

Ketua Jurusan Sastra Cina S1



(C. Dewi Hartati, SS, M. Si)

Pembimbing



(C. Dewi Hartati, SS, M. Si)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Sarjana yang berjudul:

PEMBERONTAKAN DI LHASA, TIBET TAHUN 1959

Telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 12 Agustus 2008 di hadapan
Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra

Pembimbing/Penguji



(C. Dewi Hartati, SS, M. Si)

Ketua Sidang/Penguji



(Alexandra S. Ekapartiwi, SS)

Pembaca/Penguji



(Yulie Neila Chandra, SS, M. Hum)

Disahkan pada hari Selasa, 12 Agustus 2008

Ketua Jurusan Sastra Cina



(C. Dewi Hartati, SS, M. Si)

Dekan Fakultas Sastra



(Dr. Hj. Albertine S. Minorop, MA)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

PEMBERONTAKAN DI LHASA, TIBET TAHUN 1959

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu C. Dewi Hartati, SS, M. Si, tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain. Sebagian atau seluruhnya dan isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2008.

TRI ASTUTI HANDAYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBERONTAKAN DI LHASA TAHUN 1959“. Penulisan skripsi ini penulis susun untuk melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan agar skripsi ini tersaji dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu C. Dewi Hartati, SS, M. Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
2. Ibu C. Dewi Hartati, SS, M. Si, selaku Pembimbing Angkatan dan ketua jurusan Program Studi Sastra Cina yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.
3. Ibu Alexandra Sawitri Ekapartiwi, SS, selaku ketua sidang yang tetap semangat sampai detik-detik terakhir sidang.
4. Ibu Yulie Neila Chandra, SS, M. Hum, selaku pembaca sidang yang telah meluangkan waktunya.

5. Ibu Dr. Hj. Albertine S. Minderop, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sastra Cina Universitas Darma Persada yang telah mendidik penulis.
7. Seluruh staff sekretariat, perpustakaan dan karyawan Universitas Darma Persada yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua serta Saudara/I penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, semangat serta doa yang tulus kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, karena kalian gw semangat ke kampus, pit, wid, nana, "makasi ya uda sabar banget dengerin pdc gw yang itu-itu ajah u all d best, terima kasih buat teman-teman semua atas semua kenangan yang uda qt buat selama ini".
10. Untuk Veevee, gak banyak kata yang bisa diucapkan "punya sahabat kaya lw, adalah hal terindah buat gw, ur family is my second family, makasi banget ya buat semangat yang gak pernah berhenti lw kasih ke gw".
11. Untuk Cia yang baru aja nikah, "makasi ya bu ud ngasih fasilitas laptop ke gw, satu hal yang selalu gw inget dari pesen-pesen lw, qt sebaiknya tidak menyia-nyiakan waktu, met berbahagia yah".
12. Untuk Yudi, Rendra, Elia, dan Fikar, "makasi y semangatnya, xan uda kaya sahabat, kakak n adik buat gw, ayo.. nǔli xuéxi yah".

13. Untuk km masa lalu-qu, ” jalan yang sudah qt putuskan semoga itu yang terbaik, terima kasih untuk selama ini, banyak hal yang uda qt lalui suka maupun duka dan semuanya sangat berkualitas buat aq, semoga itu bisa menjadi kenangan buat qt, km uda mengajarkan aq banyak hal, aq akan inget pesen-pesen km dengan cara aq sendiri pasti nya, wish u all d best”.
14. Anak-anak Himascida, “terima kasih atas dukungannya, lanjutkan perjuangan kakak-kakak kalian... semangat!!”
15. Semua teman-teman di Unsada yang mengenal dan telah membantu penulis, khususnya di Fakultas Sastra dan Fakultas Teknik. Maaf tak dapat disebutkan namanya satu per satu. Sekali lagi terima kasih semuanya.

Jakarta, 12 Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
1.7 Hipotesis	9

1.8 Penggunaan Ejaan.....	9
II. MENJELANG PEMBERONTAKAN DI LHASA TAHUN 1959	10
2.1 Menjelang Perundingan Tujuh Belas Poin Kesepakatan	10
2.2. Tujuh Belas Poin Kesepakatan antara Cina dan Tibet Mengenai Tindakan-tindakan untuk Pembebasan Tibet Secara Damai	11
2.3 Pemberontakan-pemberontakan Kecil	16
2.3.1 Pemberontakan di Kantse	19
2.3.2 Pemberontakan Sichuan-Chamdo	21
2.3.3 Pemberontakan di Qinghai dan Gansu	21
III. PEMBERONTAKAN DI LHASA TAHUN 1959	24
3.1 Pemberontakan Di Lhasa Tahun 1959	24
3.2 Akibat Pemberontakan Di Lhasa Tahun 1959	31
3.2.1 Perubahan Kota Lhasa	31
3.2.2 Pelarian Dalai Lama Ke India	32
3.2.3 Reformasi Demokratis 17 Juli 1959	35
3.2.4 Status Tibet	38
IV. KESIMPULAN	42
DAFTARPUSTAKA	44

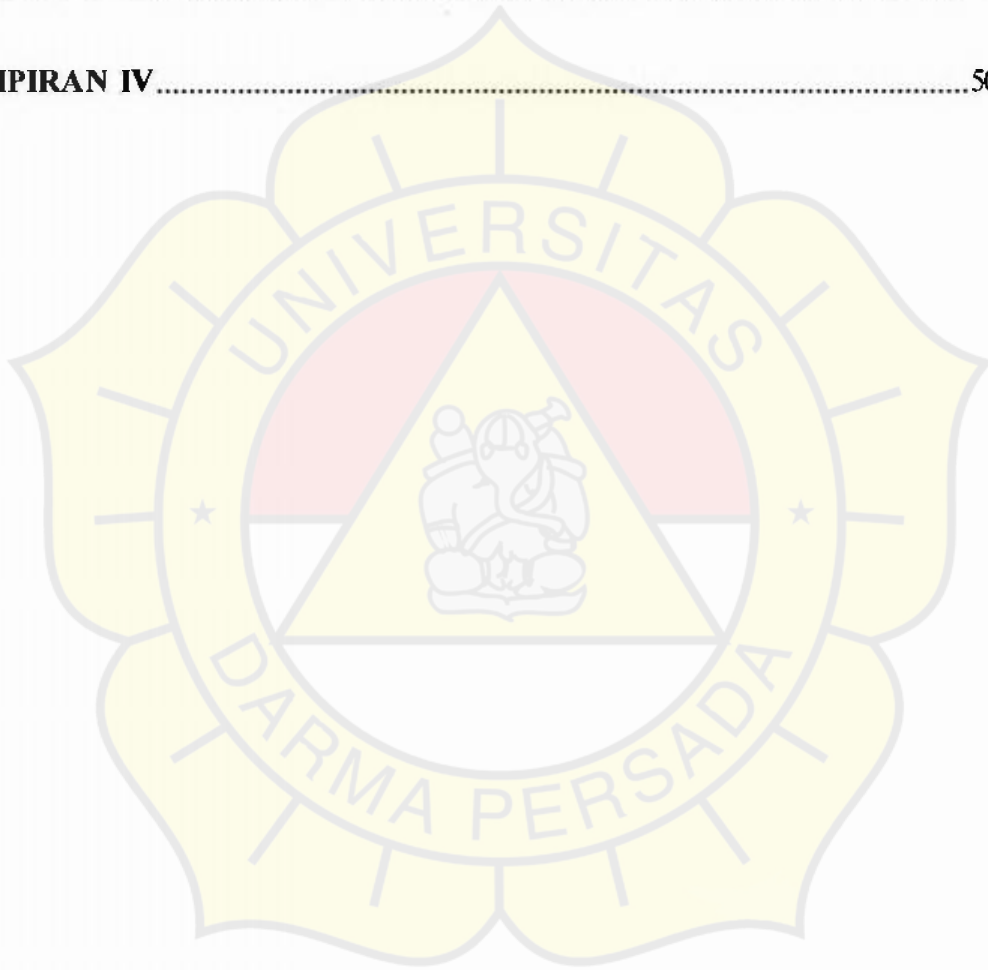
GLOSARI..... 46

LAMPIRAN I 47

LAMPIRAN II..... 48

LAMPIRAN III..... 49

LAMPIRAN IV..... 50



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tibet adalah suatu daerah yang terletak di dataran tinggi pegunungan Himalaya dan merupakan salah satu daerah yang memperoleh otonomi secara penuh dari pemerintah RRC. Daerahnya dibagi menjadi tujuh wilayah yaitu Nagchu, Chamdo, Lingtse, Gyangtse, Shigatse, Ari dan Lhasa (Candlin A.H Stanton, 1971: 40). Luas Tibet adalah 1,228,400 km² dengan penduduk sekitar 2,740,000 jiwa. Mayoritas penduduk Tibet adalah beragama Buddha (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tibet>). 92,2 % penduduk Tibet adalah suku Tibet, 5,9 % adalah suku Han, 1,9 % dan sisanya adalah suku lainnya (<http://www.chinese-studies.org/lunch-talk/china-dan-tibet.html>).

Secara geografis wilayah Tibet berbatasan dengan Yunnan di sebelah Tenggara, dengan Sichuan di sebelah Timur, dan Qinghai di Timur Laut, dengan Xinjiang di Barat, serta dengan Nepal, Bhutan, Sikkim dan Myanmar di sebelah Selatan. Pada umumnya penduduk Tibet hidup dari hasil pertanian karena kondisi geografis yang terletak di dataran tinggi. Kebanyakan para petani Tibet ini merupakan bangsa nomaden, karena terbatasnya lahan yang dapat digarap pada ketinggian rata-rata 3.700-4.300 m di atas permukaan laut (Kompas, 27 Maret 1994).

Ketika kaum Komunis mulai berhasil menggulingkan pemerintahan Nasionalis dan mendirikan Negara Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, seluruh daratan Cina belum seluruhnya berada dalam kekuasaan mereka (Kusmaryantono Henry, 1990: 1). Setelah pemerintahan Komunis berkuasa tahun 1949, Tibet mulai mendapat perhatian kembali dari Cina dan usaha-usaha untuk membebaskan Tibet mulai dilaksanakan oleh Cina.

Karena itulah pada awal tahun 1950, pemerintah RRC mengumumkan keinginannya untuk membebaskan Tibet. Pemerintah RRC mengatakan bahwa Tibet merupakan bagian dari wilayah integral Cina yang telah jatuh di bawah pengaruh imperialis asing, sehingga dianggap perlu untuk dibebaskan demi pengamanan batas-batas wilayah Cina (Kusmaryantono Henry, 1990: 2).

Pada pertengahan abad ke XIX pengaruh kekuasaan Inggris sampai ke daerah ini. Ketika itu penguasa Inggris di India bermaksud untuk memperluas usaha dagangnya ke wilayah sekitar pegunungan Himalaya. Kontak antara Inggris dan Tibet terjadi dengan segera. Pada tahun 1890 Inggris, Cina dan India menandatangani Konvensi Sikkim yang isinya menyatakan bahwa Inggris mempunyai hak untuk mengontrol urusan administrasi lokal dan hubungan dengan luar negeri dari Sikkim (Li Tieh Tseng, 1956: 212).

Meskipun demikian, Tibet tidak mau mengakui perjanjian itu dan selalu mencoba menghalangi utusan-utusan Inggris yang datang di wilayahnya (Soyomukti, 2008: 34) Pada tanggal 3 Agustus 1904, Inggris mengirimkan 300 tentara ke Lhasa untuk menduduki wilayah Tibet. Tibet dengan segera jatuh ke

tangan pasukan Inggris. Inggris kemudian menetapkan bahwa Tibet merupakan daerah protektorat Inggris (Kusmaryantono Henry, 1990 yang dikutip dari Lynn Pan, *The New Chinese Revolution*, 1988: 279).

Karena adanya dua pandangan yang berbeda antara Inggris dan Cina mengenai status Tibet, yakni Cina menganggap Tibet sebagai daerah kekuasaannya, sedangkan Inggris berpendapat bahwa Cina hanya memiliki hak-hak yang dipertuan saja atas Tibet, maka pada tanggal 27 April 1906, Cina dan Inggris sepakat untuk mengadakan perundingan yang hasilnya menetapkan status baru Tibet sebagai daerah penyangga (*buffer state*) (Li Tieh Tseng, 1956: 212). Perundingan itu membuat Inggris berjanji tidak akan mengintervensi wilayah Tibet lagi (Soyomukti, 2008: 35).

Persoalan ini membawa kita kepada masalah mengenai “kedaulatan” (*sovereignty*) atau “pertuanan” (*suzerainty*), kedua-duanya menimbulkan pertentangan. Istilah “hak dipertuan” mula-mula digunakan oleh pihak Inggris untuk membuat cair “kedaulatan” Cina. Tibet adalah suatu daerah Cina yang tidak dapat dipisahkan. Daerah ini memang mempunyai lebih banyak hak-hak dari pada provinsi Cina lainnya, akan tetapi Tibet tidak berhak memisahkan diri (Strong Anna Louise, 1960: 12-13).

Pada tahun 1914 Inggris mengadakan suatu pertemuan dengan pemerintah daerah Tibet dan diundang juga pemerintah pusat Cina. Dalam pertemuan itu Inggris mau memaksakan suatu konvensi ulang, yaitu mau memaksa pemerintah pusat Cina agar setuju Tibet berpisah dari Cina. Walaupun hal tersebut ditolak oleh pemerintah pusat Cina, dalam pertemuan itu pihak Inggris dan Tibet sendiri

berhasil membuat suatu kesepakatan yang disebut Konvensi Simla (<http://www.chinese-studies.org/lunch-talk/china-dan-tibet.html>). Hasil dari Konvensi Simla adalah Inggris membagi kawasan-kawasan Tibet yang dihuni oleh para penduduk Tibet menjadi Tibet Luar dan Tibet Dalam. Tibet Luar merupakan kawasan yang sekarang dikenal dengan Kawasan Otonomi Tibet. Tibet Dalam, terdiri dari Kham timur dan Amdo. Penguasa Lhasa hanya memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan masalah keagamaan (Soyomukti, 2008:36).

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 1950 waktu RRC berdiri, pimpinan pertama Cina yaitu Mao Zedong, memutuskan mengirimkan pasukan ke Tibet, karena khawatir Tibet akan dipisahkan dari wilayah Cina oleh Inggris pada waktu itu (<http://www.chinese-studies.org/lunch-talk/china-dan-tibet.html>).

Selain karena khawatir Tibet akan dipisahkan dari wilayah Cina, ada beberapa alasan yang dipakai Cina untuk melakukan aneksasi ini. Pertama, atas dasar sejarah karena sejak zaman Qing (1644-1911), dinasti terakhir yang memerintah Cina, Tibet sudah berada di dalam kekuasaannya. Kedua, adalah perhitungan strategis. Pada zaman ketika ideologi memegang peran yang begitu kental semasa Perang Dingin, Tibet dianggap sebagai penyangga demi keamanan Cina dari ancaman India yang dianggap sebagai kekuatan pro-Barat. Hanya saja sejak dimulainya pendudukan itu kerusakan kerap terjadi. Inti penyebabnya tak lain karena Cina dianggap sebagai penjajah, dan rakyat Tibet menginginkan kemerdekaan. Ketidakpuasan itu makin meningkat karena Cina di bawah Mao

melakukan pembatasan yang sangat ketat atas kegiatan keagamaan di tanah yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan agama Budha. Untuk pengintegrasian menyeluruh, Tibet diberi status otonomi, kemudian pemerintah Beijing melancarkan berbagai kampanye politik dan sosial. Gunanya untuk membuatnya jadi wilayah tempat berkembangnya sosialisme sesuai dengan impian Mao, seperti juga yang dilakukan di seluruh wilayah Cina (<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3205952,00.html?maca=ind-rss-ind-all-1487-rdf>).

Sejak awal Mao beranggapan mustahil meletakkan masalah Tibet tanpa mempertimbangkan kekuatan militer (Soyomuki, 2008: 43). Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer dalam melakukan pendudukan terhadap Tibet pun diambil atas pertimbangan bahwa Tibet sangat kondusif bagi strategi menghadapi kekuatan internasional. Partai Komunis Cina (PKC) tahu bahwa, walaupun secara *de facto* Tibet merdeka sejak tahun 1911 hingga 1950, masyarakat secara formal tidak mengakuinya sebagai negara yang merdeka (Soyomuki, 2008: 44-45).

Pada musim panas 1950, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) tiba di Tibet melalui perjalanan panjang ke Barat Daya, dari Sichuan menuju Tibet (Soyomuki, 2008: 45). Tanggal 7 Oktober 1950 dimulai serangan TPR terhadap Chamdo. Setelah berlangsung selama dua minggu, Pasukan Cina dengan mudah bergerak melewati pasukan Tibet yang tak lagi terkomando dan bersenjata kurang lengkap. Karena pasukan Tibet hampir tanpa perlawanan antara Chamdo dan Lhasa, maka pintu menuju ibukota Tibet terbuka bagi TPR (Soyomukti, 2008: 46). Setelah perlawanan dari pasukan Tibet berhenti, para pimpinan Cina mengubah strategi

untuk melakukan perundingan dengan Dalai Lama dan para tokoh di Lhasa. Partai Komunis Cina memperjelas bahwa syarat bagi solusi damai untuk Tibet adalah penerimaan penguasa Tibet di Lhasa untuk mengakui bahwa Tibet adalah bagian integral dari RRC. Para pejabat Cina juga menekankan bahwa untuk selanjutnya Tibet akan diubah menjadi masyarakat yang berdasar pada “demokrasi rakyat”, suatu fase kelompok komunis Cina yang mengacu pada tindakan untuk menghancurkan struktur politik, ekonomi dan sosial-budaya Tibet yang tradisional dan menggantikannya dengan struktur sosialis yang modern. Namun, untuk memastikan bahwa penguasaan secara damai terhadap Tibet dapat dicapai, Mao mau menerima beberapa kompromi, termasuk membiarkan sementara ekonomi politik feodal berjalan, dan dengan konsesi ini Dalai Lama mau mengakui kedaulatan Cina (Soyomuki, 2008: 46-47).

Setelah Tibet berhasil dikuasai oleh RRC, ternyata timbul banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Beijing. Didudukinya Tibet oleh RRC ini ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh rakyat Tibet. Selain itu, pemerintah RRC juga banyak mendapat protes dan kecaman dari negara lain sehubungan dengan pendudukan Tibet tersebut.

Perjuangan rakyat Tibet untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pemerintah RRC tidak berhenti begitu saja. Pemberontakan dalam skala kecil mulai bermunculan di berbagai daerah di Tibet.

Karena hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan masalah pemberontakan Tibet tersebut.

1.2 Permasalahan

Dalam penelitian ini masalah-masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah status Tibet setelah pemberontakan di Lhasa pada tahun 1959.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis membatasi permasalahan tentang pemberontakan dan status Tibet setelah pemberontakan di Lhasa pada tahun 1959.

1.4 Tujuan Penulisan

Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberontakan di Lhasa pada tahun 1959 dan akibat-akibat yang ditimbulkan serta status Tibet setelah pemberontakan. Sehingga, nantinya skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi mereka yang tertarik terhadap masalah Tibet maupun yang berminat dalam membahas sejarah Cina pada umumnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Bahan-bahan dan data yang dipergunakan, diperoleh dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyeleksi literatur-literatur baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan, hipotesis dan bab I diakhiri dengan penggunaan ejaan.

BAB II MENJELANG PEMBERONTAKAN DI LHASA TAHUN 1959

Bab kedua akan membahas latar belakang terjadinya Perundingan antara Cina dan Tibet mengenai tindakan-tindakan untuk pembebasan Tibet secara damai yang disebut tujuh belas poin kesepakatan beserta isi dari perjanjian tersebut, pemberontakan kecil di Tibet, Pemberontakan di Kantse, pemberontakan Sichuan-Chamdo dan Pemberontakan di Qinghai dan Gansu.

BAB III PEMBERONTAKAN DI LHASA TAHUN 1959

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang pemberontakan di Lhasa pada tahun 1959 dan akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan, seperti perubahan kota Lhasa setelah pemberontakan, larinya Dalai Lama ke India, terjadinya reformasi demokratis dan status Tibet.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab-bab sebelumnya.

1.7 Hipotesis

Pemberontakan yang terjadi di Tibet bersumber pada masalah status Tibet itu sendiri. Pemerintah Cina menganggap Tibet adalah daerahnya, namun Tibet tidak merasa demikian.

1.8 Penggunaan Ejaan

Dalam penulisan skripsi ini, nama atau istilah dalam bahasa *Cina* berdasarkan ejaan *Hanyu Pinyin* (汉语拼音). Namun demikian, nama-nama dan istilah yang sudah populer di kalangan masyarakat luas tidak ditulis dalam bahasa *Han* (Mandarin) seperti bahasa *Hokkian*, *Kanton*, *Hakka* atau dalam bahasa Tibet itu sendiri tetap dipertahankan.